

**PELAKSANAAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010-2015**

by:

Vito Pratama

E-mail: vtpratama @ gmail .com

Adviser Lecturer : Dra. Hj. Wan Asrida.M.Si

*Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences
University of Riau*

Program Study of S1 Government Science FISIP University of Riau
Bina Widya College Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

With magnitude potential owned tourism by Kampar, then Local Government District. Kampar do an important step by organizing tourism potentials owned by Kampar Regency. The main steps that should be carried out within the framework of the development of the tourism sector Kampar District is preparing a Plan Regional Tourism Development Master Kampar, then expected able for improve development tourism in Kampar. By because that aim research this is for knowing implementation Plan Regional Tourism Development Master Kampar.

The method used in writing research this is approach qualitatively. Informants of this study were chosen purposively based on characteristics or specific characteristics based on research needs. That is 7 people.

As for results research RIPKD implementation Kab. Kampar are: 1) lack of work same government with developers tourism, 2) has not existence promotion done government constrained because inadequate budget and source power human, 3) formation group conscious tours this not yet accomplished. While obstacles is 1) Situation people are still not yet can for receive climate tourism whole, 2) Presence in part object still travel located in in Forest custom and Forest protection, 3) Presence object Scattered travel make hard for formed ka-bag ntong destination travel.

With existence barriers, then efforts that could do are: 1) Increasing Cooperation. 2) Development Investment, 3) Development Infrastructure, 3) Formation Destinations Featured, 4) Increased Promotion to Regional Affairs / Interior., 5) Formation Institutional, 6) Participation Society, 7) Awareness Society

Word Keywords: Implementation RIPKD

PENDAHULUAN

Pengembangan industri pariwisata di suatu negara atau daerah memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Salah satu peranan penting industri pariwisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) karena hal ini akan memicu lebih banyak pendapatan devisa (karena setiap turis asing menghabiskan rata-rata antara 1.100 dollar AS sampai 1.200 dollar AS per kunjungan) dan juga menyediakan kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia (berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di negara ini mencapai 5,81% di Februari 2015). Diperkirakan bahwa hampir 9% dari total angkatan kerja nasional dipekerjakan di sektor pariwisata.

Di tahun 2015, Pemerintah Indonesia memberikan tambahan akses bebas visa ke Indonesia kepada warga dari 45 negara (Peraturan Presiden No. 69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan) dalam rangka mendongkrak industri pariwisata.

Seiring kebijakan pemerintah, maka telah menjadi tantangan sekaligus peluang bagi suatu daerah yang memiliki potensi pariwisata. Peluang yang didapatkan adalah banyaknya para wisata-wan yang berkunjung akan meningkatkan sektorsektor ekonomi lainnya,

Namun tantangan yang harus dihadapi oleh daerah adalah Kurangnya infrastruktur yang layak di Indonesia adalah masalah yang berkelanjutan, bukan hanya karena hal ini sangat meningkatkan biaya-biaya logistik sehingga membuat iklim investasi kurang menarik namun juga mengurangi kelancaran perjalanan untuk pariwisata.

Sektor pariwisata sesungguhnya merupakan sektor yang sangat potensial dan mempunyai prospek pengembangan di Kabupaten Kampar. Namun, sektor

tersebut belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Padahal sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Secara umum Potensi Pariwisata Kabu. Kampar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

No	Kecamatan	Ekowisata	Alam	Budaya	Sejarah
1	Kampar Kiri	1	2	3	2
2	Kampar Kiri Hulu	3	2	1	0
3	Kampar Kiri Hilir	0	1	0	0
4	Kampar Kiri Tengah	0	2	0	0
5	Gunung Sahilan	2	0	2	1
6	XIII Koto Kampar	3	2	5	1
7	Bangkinang Barat	1	0	7	1
8	Salo	0	1	1	0
9	Tapung	0	1	4	0
10	Tapung Hulu	1	1	0	0
11	Tapung Hilir	0	0	2	0
12	Bangkinang	0	3	3	0
13	Bangkinang Seberang	1	1	3	0
14	Kampar	0	0	8	3
15	Kampar Timur	0	0	2	1
16	Rumbio Jaya	0	1	0	0
17	Kampar Utara	0	2	1	0
18	Tambang	0	1	1	0
19	Siak Hulu	1	2	3	0
20	Perhentian Raja	0	1	0	0
21	Koto Kampar Hilir	0	0	5	0
	Jumlah	13	23	51	9

Dengan besarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar, maka Pemerintah Daerah Kab. Kampar melakukan langkah penting dengan menata potensi-potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Kampar. Serta mencari strategi dalam pengembangan sektor pariwisata ditentukan oleh sumber daya wisata dan kekuatan daya tariknya.

Langkah utama yang harus dilakukan dalam kerangka pengembangan sektor kepariwisataan Kabupaten Kampar adalah menyusun suatu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar, yang akan dijadikan bahan arahan/panduan dalam mengembangkan progra-program pembangunan kepariwisataan kabupaten secara menyeluruh.

Dengan adanya program yang telah dirancang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPKD) Kampar tersebut, maka diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kampar. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak hambatan/kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga baik kegiatan langsung maupun tidak langsung,

.Hasil penelusuran awal di lapangan, maka didapatkan permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Kegiatan wisata yang berlangsung selama ini kurang terpadu secara sektoral antara pelaku (masyarakat swasta dan pemerintah)
2. Kurang terasa nuansa budaya, karakter dan sifat spesifik masyarakat.
3. Kurangnya infrastruktur, kurangnya sarana dan prasarana pendukung menyebabkan potensi wisata tidak terealisasi ke dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan penduduk lokal.
4. Kurangnya promosi keluar daerah maupun keluar negeri. Berikut ini jumlah event yang diikuti dalam rangka promosi pariwisata Kabupaten Kampar:

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengadakan suatu penelitian, dengan judul: **Pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten kampar tahun 2010-2015.**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015?
2. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015?

KERANGKA TEORI

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Rahmat Haryadi Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan.⁽ Ekhardi. 2010)

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita, mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut

dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita di atas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. (Poerwarminta, 2003)

Pengertian Pelaksanaan Menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Sedangkan Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. (Adisasmata, 2011)

Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. (Adisasmata, 2011)

Jadi berdasarkan pada pendapat para ahli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan oleh sebuah organisasi, dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Untuk menilai suatu keberhasilan implementasi kebijakan, maka diperlukan criteria pengukuran. Menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin et al. (1990: 20-21, 31-40), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. (Imronah, 2016)

Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui: (i) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan dan (ii) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi

pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat. (Imronah, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan yang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistik seta sistematis. (Patilima, 2010)

Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar bidang Pariwisata. Alasan atau pertimbangan di tetapkannya Kabupaten Kampar menjadi lokasi penelitian adalah karena Kabupaten Kampar memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus, mulai dari pariwisata alam, maupun pariwisata religinya.

Informan Penelitian

Dalam menentukan informan ini Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat di tetapkan, proses penilitian langsung dari suatu informasi ke informasi lainnya. Informan penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara purposive ini dimaksudtukan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan

secara memberi informasi secara akurat dalam permasalahan penelitian ini.

No	Nama	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Drs.H.Syamsul Bahri,M.Si,	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar	1
2	Yong Kholid Muda	Kasi Bina Objek Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	1
4	Masyarakat	Tokoh Masyarakat	5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2010-2015. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka didapatkan hasil penelitian:

Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015

Adapun hasil penelitian dilihat dari pelaksanaan RIPKD Kab. Kampar adalah:

1. Pengembangan kerja sama antara pemerintah (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar) dengan pihak pengembang atau pemilik tempat wisata ini masih belum terlaksana dengan baik.
2. Investasi pariwisata di Kabupaten Kampar telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, dengan membangun akses jalan ke objek-objek wisata, penerangan, dan penyediaan sarana pengairan. Pembangunan sarana dan prasarana yang ada, namun masih belum dapat mencapai setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Kampar.
3. pemerintah sudah mengupayakan setiap pembangunan sarana dan prasarana yang ada, namun masih belum dapat mencapai setiap objek

- wisata yang ada di Kabupaten Kampar.
4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar harus mampu untuk menciptakan konsep pariwisata tersendiri bagi setiap daerah atau setiap kecamatan, sehingga bisa dijadikan sebagai kantong-kantong destinasi pariwisata unggulan.
 5. promosi yang dilakukan pemerintah terkendala karena minimnya anggaran dan sumber daya manusia, jadi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kampar hanya melakukan promosi dengan mengikuti event-event dan mempromosikan melalui media online dan media sosial.
 6. pembentukan kelompok sadar wisata ini belum terlaksana, hanya sekedar wacana saja. Sehingga pemerintah harus lebih berperan aktif dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPKD) untuk masa yang akan datang.
 7. program pengembangan kelembagaan masyarakat yang belum terlaksana dengan baik oleh pemerintah kabupaten Kampar. khususnya Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga.
 8. Pemerintah belum menganggarkan pengeluaran untuk pengembangan pendidikan pariwisata ini. Dan juga keterbatasan sumber daya pengajar serta sumber daya penyluh.
2. Keadaan masyarakat yang masih belum bisa untuk menerima iklim pariwisata seutuhnya,
 3. Keberadaan sebagian objek wisata yang masih berada di dalam hutan adat dan hutan lindung,
 4. Keberadaan objek wisata yang terpencar menjadikan susahnya untuk dibentuk kantong-kantong destinasi wisata.
 5. Keadaan masyarakat yang masih sulit untuk menerima kedatangan wisata asing
 6. Sarana dan prasarana yang masih belum bisa menunjang dibentuknya destinasi pariwisata,
 7. Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya modal,
 8. Kurang pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari sektor pariwisata,

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015

Adapun upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan RIPKD Kab. Kampar adalah:

1. Peningkatan Kerjasama. Kerja sama ini bisa dilakukan dengan berbagai instansi,
2. Pengembangan Investasi. Pengembangan investasi pada bidang pariwisata ini bisa dilakukan dengan kerja sama dengan pihak swasta.
3. Pengembangan Infrastruktur. Pengembangan infrastruktur ini dapat dilakukan dengan menggandeng pihak swasta atau pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata,
4. Pembentukan Destinasi Unggulan. Destinasi unggulan Kabupaten Kampar saat ini masih belum ada, sehingga perlu dilakukan pembentukan destinasi unggulan.
5. Peningkatan Promosi ke Luar Daerah/Negeri. Peningkatan Promosi ke Luar Daerah/Negeri bisa dilakukan

Hambatan Dalam Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015

Adapun hambatan dalam pelaksanaan RIPKD Kab. Kampar adalah:

1. Kurangnya kerja sama antar pihak yang terlibat dalam pengembangan potensi pariwisata

- dengan memanfaatkan perkembangan teknologi,
6. Pembentukan Kelembagaan. Pembentukan kelembagaan yang selama ini belum maksimal, seharusnya lebih dimaksimalkan lagi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
 7. Partisipasi Masyarakat. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata.
 8. Kesadaran Masyarakat. Seharusnya pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat, melalui pemberian informasi kepada masyarakat tentang potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015 adalah: a) Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang pengembangan potensi pariwisata yang ada di kabupaten Kampar; b) Kurang tertatanya objek wisata yang ada di Kabupaten Kampar, serta kurang tertatanya hubungan antar instansi yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata tersebut; c) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata bagi masyarakat; d) Masih adanya masyarakat yang menolak pengembangan pariwisata di kabupaten Kampar dengan alasan budaya yang berbeda; 5) Kurangnya sumber daya manusia untuk mensosialisasikan pentingnya pengembangan pariwisata.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPKD), masih kurang baik. Karena beberapa hal, seperti:

1. Secara umum pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015 masih kurang baik, karena kurangnya kerja sama antara pemerintah dan swasta masih belum terlaksana dengan baik, pengembangan investasi yang terkendala birokrasi, infrastruktur yang masih tidak terjaga dengan baik, tidak adanya destinasi wisata khusus unggulan, promosi yang dilaksanakan masih kurang efektif, peran dari kelompok masyarakat sadar wisata masih belum maksimal, peran masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata belum maksimal, kesadaran masyarakat untuk mengelolah potensi pariwisata masih kurang.

3. Adapun upaya yang bisa dilakukan adalah: 1) meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam mengembangkan potensi pariwisata; 2) Mendorong investasi swasta, dengan mempermudah birokrasi; 3) Pengembangan infrastruktur ini dapat dilakukan dengan menggandeng pihak swasta atau pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata; 4) pembentukan program destinasi wisata yang menjadi unggulan Kabupaten Kampar; 5) Peningkatan Promosi ke Luar Daerah/Negeri, dengan menggunakan media online, 6) Pembentukan kelembagaan masyarakat/ kelompok masyarakat sadar wisata.

Saran

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang

bisa dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pada saat ini kebutuhan akan tenaga manusia yang memiliki pengetahuan tentang pariwisata sangat tinggi di Kabupaten Kampar, terutama sebagai tenaga penyuluh. Oleh karena itu pemerintah Kampar harus bisa menyediakan sarana pendidikan khusus untuk kepariwisataan. Saat ini telah ada universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu seharusnya pemerintah melakukan kerja sama dan membuka jurusan kepariwisataan, atau memasukkan kepariwisataan sebagai salah satu mata kuliah wajib. Selain itu juga bisa memberikan beasiswa untuk masyarakat yang ingin kuliah di bidang kepariwisataan. Dengan adanya program tersebut, diharapkan terciptanya sarjana-sarjana yang memiliki bidang ilmu kepariwisataan. Sehingga mereka bisa mengubah pola pikir masyarakat terhadap pengembangan pariwisata.

2. Peningkatan kerja sama

Kerja sama ini bisa dilakukan dengan berbagai instansi, selain itu juga bisa dilakukan dengan pemilik atau pengembang objek-objek pariwisata. Kerja sama dengan instansi pemerintah seperti dengan Dinas PU, dalam rangka pembangunan akses jalan menuju objek wisata, Dinas bina marga dan pengairan untuk membangun sarana dan prasarana kebersihan di lokasi pariwisata, dan PLN untuk membangun sarana penerangan, baik untuk lokasi objek wisata, maupun akses menuju objek wisata tersebut. Selain itu kerja sama dengan pihak swasta bisa dengan menarik investor untuk menanamkan modal dalam bidang pembangunan objek wisata, atau pembangunan sarana-prasarana permainan di Objek wisata. Sehingga makin menarik

wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut.

3. Pembentukan Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan yang selama ini belum maksimal, seharusnya lebih dimaksimalkan lagi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Maka pembentukan kelembagaan inilah yang bisa menjadi alternatif untuk mensosialisasikan dan mengubah pola pikir masyarakat tentang pariwisata dan wisatawan. Karena dengan adanya kelompok masyarakat sadar wisata, maka saat akan dilakukan sosialisasi yang perlu dikumpulkan hanya petinggi kelompok saja. Nantinya pimpinan menyampaikan informasi yang diterima dari pemerintah tentang pengembangan pariwisata kabupaten Kampar kepada anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alma Buchari, 2009, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Almasdi Syahza, 2009. *Metodologi Penelitian*, Riau: Cv Witra Irzani,
- Fandy Tjiptono, 2005, *Pemasaran Jasa*, Malang: Bayu Media Publisng
- Hamid Patilima. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta,
- Imronah, 2016, *Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah Demak*,.
- Kotler, Amstrong, 2009, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, edisi 12 jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu,

- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Tony Djogo, dkk, 2003, *Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*, Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF),
- W,J,S, Poerwarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Wawancara, Kabid Objek Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, 6 Sept 2016
- Drs.H.Syamsul Bahri,M.Si, (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar), wawancara, 8 Februari 2017
- M. Ja'far, Masyarakat Desa Bokuok, Tambang, Wawancara, 17 Februari, 2017.

Dokumentasi

- Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2016, *Pedoman penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten/Kota*. Afrizon Saputra, dkk, 2016, *Laporan Capita Seleкта*, Pasca Sarjana Unri,
- Asril, (pemilik Sungai Hijau 3), wawancara 12 Februari 2017
- Abdul Muis, Masyarakat Desa Muara Takus, wawancara, 15 Februari, 2017
- Buk Mirna, (Pemilik Rumah Lontiok), Wawancara, 12 Februari 2017
- Ade Saputra, (Wisatawan di Pulau Simo), Wawancara 19 Februari 2017
- Ekhardi. 2010. *Pengertian Pelaksanaan*. Tersedia dalam: <http://ekhardhi.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2016.
- Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, 2014, *Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2013-2016*, <http://www.kompas.com>. Akses pada 7 September, 2016
- <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/-item6051>, akses 9 November 2016
- Pasca Sarjana Unri, *Laporan Capita Seleкта*, 2016,

Wawancara